

Simbiosis Mutualisme Media Massa dan Terorisme: Sebuah Analisis Kebijakan Pemerintah RI Melawan Terorisme

Ali Ridho

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
ridhoali975@gmail.com

Nurul Izzah S.M. Aksan

Universitas Islam Indonesia
Nurulizzahsm.aksan@gmail.com

Mohammad Sujud

Institut Agama Islam Negeri Curup
mohammadsujud91@gmail.com

Abstract

Terrorism is the enemy of humanity, nation and state in Indonesia. The rapid change and revolution in the world of technology, information, and communication is believed to be the biggest cause of the growth and development of terrorist ideologies. The majority of the mass and digital media on the other hand stand in the lap of capitalists who take advantage of the news of world terrorism, like a symbiosis of mutualism. The research focuses on the phenomenon of the relationship between mass and digital media and terrorism, as well as reading the steps of the Indonesian government in minimizing the spread of information and negative content of terrorism targeting the younger generation in Indonesia through social media. This research is a qualitative model with a content analysis approach and research data is obtained from various mass and digital media platforms, books, and reputable journals. The research concludes that the Indonesian government needs public cooperation, including mass and digital media, in an effort to minimize the spread of ideology and acts of terrorism in the digital realm. The notion of terrorism has infiltrated the younger generation through social media, so digital media literacy is considered a powerful weapon for the government to fight negative narratives targeting the millennial generation for the purpose of the ideological nation, recruitment, and acts of terror by terrorist organizations. In addition, it is necessary to create positive and soothing content as a resistance to transnational movements that differ in vision and mission from the ideology of the Indonesian state and society simultaneously and massively.

Keywords: *Mass Media, Digital, Terrorism, Terrorism Ideology*

Abstrak

Terorisme menjadi musuh kehidupan kemanusiaan, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Melesatnya perubahan dan revolusi dunia teknologi, informasi, dan komunikasi diyakini menjadi penyebab terbesar tumbuh dan berkembangnya ideologi-aksi terorisme. Mayoritas media massa dan digital di lain sisi berdiri dipangkuan kapitalis yang mengambil keuntungan dengan pemberitaan terorisme dunia, layaknya sebuah simbiosis mutualisme. Penelitian mengambil fokus kepada fenomena hubungan media massa dan digital dengan terorisme, serta membaca langkah pemerintah RI dalam meminimalisir penyebaran informasi dan konten negatif terorisme yang menyasar generasi muda di Indonesia melalui media sosial. Penelitian ini model kualitatif dengan pendekatan content analysis dan data penelitian diperoleh dari berbagai platform media massa dan digital, buku, jurnal bereputasi. Penelitian menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia memerlukan kerja sama publik, termasuk media massa dan digital dalam usaha meminimalkan penyebaran ideologi dan aksi terorisme dalam ranah digital. Paham terorisme telah menyusupi generasi muda melalui media sosial, sehingga literasi media digital dinilai menjadi senjata ampuh bagi pemerintah untuk melawan narasi-narasi negatif yang menargetkan generasi milenial untuk tujuan ideologisasi, perekrutan, dan aksi teror oleh organisasi terorisme. Selain itu, diperlukan penciptaan konten-konten positif dan menyejukkan sebagai perlawanan terhadap gerakan arus transnasional yang berlainan visi-misi dengan ideologi negara dan masyarakat Indonesia secara simultan dan masif.

Kata Kunci: Media Massa, Digital, Terorisme, Ideologi Aksi Teror

Pendahuluan

Radikalisme dan terorisme di Indonesia tumbuh subur beberapa dekade terakhir.¹ Radikalisme merupakan embrio terorisme, dan sebaliknya. Terorisme muncul bukan dari salah satu agama, semua agama di dunia mempunyai akar dan potensi radikalisme, sebagaimana yang terjadi di India, Myanmar, Selandia Baru, hingga hingga kawasan Timur Tengah. Dampak yang dimunculkan embrio radikalisme dalam agama adalah aksi teror di berbagai belahan dunia, pengeboman kantor FBI oleh penganut agama Katolik, teror di Irlandia oleh seorang penganut Protestan dan Presiden Rajiv Gandhi dibunuh oleh radikalisme agama Hindu, pembunuhan terhadap penduduk di Poso, dan penangkapan ratusan simpatisan dan pelaku teror di berbagai wilayah Indonesia yang terafiliasi dengan Jamaah Islamiah (JI).²

Dalam publikasi *Index Global Terorisme* tahun 2017, Indonesia mendapatkan ranking 42 negara yang mendapatkan dampak dari serangan atau aksi teror. Diantara negara yang mengalami dampak paling parah yang diakibatkan oleh aksi terorisme adalah Iraq yang menempati peringkat ke-1, disusul Afghanistan di posisi ke-2, Nigeria di posisi ke-3, dan

¹ Monique. Aisy, Bilqis., Ibrahim, Dina., Intang, Khusnul., Tindage, “*Penegakan Kontra Radikalisasi Melalui Media Sosial Oleh Pemerintah Dalam Menangkal Radikalisme* Bilqis Rihadatul Aisy , Dina Oktarina Ibrahim , Khusnul Khatimah Haruna Intang , Monique Anastasia Tindage Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jalan Airlangga,” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2 (2019): 1–8.

² M. A.Muqtedar Khan and Rifat Binte Lutful, “Emerging Hindu Rashtra and Its Impact on Indian Muslims,” *Religions* 12, no. 9 (2021), <https://doi.org/10.3390/rel12090693>.

Suriah berada diperingkatke- 4. Sementara pada tahun 2019/2020 Indonesia mendapatkan peringkat ke-32, hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan aksis radikalisme dan terorisme sesungguhnya mengalami peningkatan di Tanah Air.³ Seruan aksi teror di Indonesia dikirimkan dari Timur-Tengah melalui tabloid-tabloid yang dimiliki oleh jaringan terorisme, diantara tabloid yang terkenal adalah tabloid *al-Fatihin*. Tabloid *al-Fatihin* merupakan tabloid yang isinya merupakan kumpulan tulisan karya warga negara Indonesia yang telah bergabung dengan ISIS serta menjadi tokoh ISIS di Suriah.⁴ Sebagai contoh Salim Mubarak al-Tamimi, Bahrun Shah, Bahrun Naim, Ghanab Brada Rizal dan Munawar Kholil. Dari beberapa tokoh teroris tersebut, masing-masing mempunyai keahlian dalam menulis bahasa Arab yang berasal dari Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud pimpinan Oeman Abdurahman di wilayah Bogor.⁵

Para kombatan mendapatkan tugas menulis buku-buku karya Abu Muhammad al-Maghdisi. Ironisnya buku-buku karya Abu Muhammad al-Maghdisi mudah dijumpai di internet, google dan media sosial serta bebas diakses oleh para pengguna internet di seluruh penjuru dunia dengan judul aslinya *Muqorrob fi Tauhid*. Buku karangan al-Maghdisi digunakan panduan oleh jaringan aksi teror di Indonesia untuk melakukan aksi teror. Menurut salah satu pimpinan Densus 88 Anti Teror, buku tersebut setelah diteliti dan didalami didapatkan bahwa *Muqorrob fi Tauhid* adalah panduan melakukan aksi bom bunuh diri. Dalam kasus penangkapan pelaku aksi teror di Sumatera Selatan dengan inisial (F) usia 14 tahun, dalam proses deradikalisasi ditemukan fakta bahwa (F) dimasukkan ke suatu *taklim* khusus dengan diberikan materi dari buku *muqorrob fi tauhid* yang berisi pembatalan ke-Islaman, *thagbut anshor thagbut*, *kafir demokrasi*, *takfiri*, *hijrah*, *khilafah*, *daulah*, *keistimewaan ijthadi* serta *mati syahid*. Sehingga dapat dipahami, pengajian yang dilakukan oleh kelompok teror yang menasar anak-anak, remaja, ibu rumah tangga hingga golongan pendidik dan profesional untuk menjadi pelaku bom bunuh diri. Akibatnya, penangkapan dilakukan oleh densus 88 anti teror terhadap 11 anak untuk kemudian dilakukan proses deradikalisasi.⁶

Aksi terorisme di seluruh dunia tumbuh subur dan memperbesar basis jaringannya manakala suatu pemerintah telah mengalami *phobia* dan *pragmatis*. Sebab, radikalisme merupakan pertemuan antara ideologi dan kepentingan politik, di mulai munculnya sekte Wahabi di Arab Saudi, Ikhwanul Muslimin di Mesir yang sejarahnya telah di ujung tanduk penghabisan di masa pemerintahan Jamal Abdul Nashir,⁷ namun dibangkitkan kembali pada era Anwar Saddat yang membutuhkan legitimasi politik di Mesir, lalu Anwar Saddat dibunuh oleh anggota IM kala itu.⁸ Pada tahun 2004-2014 pemerintah Indonesia memiliki

³ Firdhy Christy Esterina, "Global Teroris Indeks 2019," 2020, <https://data.tempo.co/data/732/global-teroris-indeks-2019>.

⁴ J. T. Haryanto, "Perkembangan Gerakan ISIS Dan Strategi Penanggulangannya (Kasus Perkembangan Awal ISIS Di Surakarta) (The Development of the ISIS Movement and the Strategy in Handling It: The Initial Development Case of ISIS in Surakarta)," *Harmoni: Jurnal Multikultural Dan Multireligius* 14, no. 3 (2015): 12–25.

⁵ Suci Amaliyah, "Mencari Format Kebijakan Terbaik Dalam Merespons Kepulungan Wni Eks-Isis," *Jurnal Kajian Lembannas RI*, 2020, 61–73, www.Tribunnews.com.

⁶ BNPT, "Kontra Terorisme Di Indonesia," 2020, <https://www.bnpt.go.id>.

⁷ Nadim Mirshak, "The Muslim Brotherhood in Egypt: A Gramscian Re-Examination," *Current Sociology*, 2021, <https://doi.org/10.1177/00113921211039273>.

⁸ Elisa Orofino, "The Muslim Brotherhood A Contested Islamist Actor BT - Handbook of Contemporary Islam and Muslim Lives," ed. Ronald Lukens-Bull and Mark Woodward (Cham: Springer International Publishing, 2020), 1–19, https://doi.org/10.1007/978-3-319-73653-2_103-1.

prinsip *Thousand Friend Zero Enemy*, pemerintah memberikan suatu bentuk kekuasaan yang diberikan kepada kelompok-kelompok radikal-teroris di beberapa kementerian yang pada akhirnya hingga sekarang sulit untuk dibersihkan keberadaannya. Manakala pemerintah di era sekarang memiliki prinsip yang sama, dalam penanganan kasus radikalisme dan intoleransi yang cenderung tidak memiliki ketegasan dalam menindak para pelakunya dan membatasi dengan ketat laju pergerakan ideologi ekstrim yang mengarahkan pada aksi teror, maka nasib bangsa Indonesia tinggal menunggu waktu dalam beberapa dekade ke depan.

Indonesia pada saat ini sedang mengalami suatu fenomena yang disebut dengan *surplus radikalisme*, manakala radikalisme telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari masyarakat umum, Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai BUMN hingga TNI dan Polri.⁹ Suatu tindakan radikalisme dan terorisme pada dasarnya dilegitimasi oleh suatu ideologi yang memiliki tingkatan-tingkatan. Yang paling bawah dimulai sikap *eklusivisme*, manakala suatu individu atau kelompok yang menjaga jarak dari masyarakat pada umumnya, dikenal dengan istilah konsep *al wala' wal bara'* yaitu loyalitas kepada satu kelompok dan permusuhan terhadap kelompok lain. Dalam bahasa lain dikemukakan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang merupakan ideolog dari kelompok salafi-wahabi, *bajrul mustathi'* yaitu menghindari suatu pergaulan dengan para ahli *bid'ah*.¹⁰

Di sisi lain ada hal menarik mengenai definisi *hijrah* yang pada umumnya menjadi model keberagamaan baru pada masyarakat perkotaan di Indonesia. Meskipun model hijrah tersebut memiliki kesan diperlembut, manakala tidak dilakukan antisipasi secara masif, akan mempunyai kecenderungan mengangkat senjata dan aksi teror. Hal ini berangkat dari beberapa organisasi dakwah yang merupakan kelompok trans-nasional yang memiliki jaringan di wilayah Timur Tengah dan sekitarnya. Sebagai contoh, HTI yang memiliki catatankudeta beberapa kali di Yordania, Lebanon, Tunisia serta Indonesia, manakala HTI melakukan pengakuan murni untuk berdakwah, fakta sebenarnya itu merupakan suatu tahapan dari *siyasah syar'iyah* HTI untuk berlindung dan tidak dilakukan penindakan oleh pemerintahan yang berkuasa melalui aparat hukum.¹¹

Kelompok yang menginginkan *Daulah Islamiyah* atau negara khilafah menurut penulis, tidak mesti merupakan bagian dari teroris. Namun, semua pelaku terorisme menginginkan negara khilafah. Berangkat dari doktrin yang dimiliki para pelaku teror, bahwa Indonesia merupakan *darul kufr* dan mereka melakukan *takfirul bukkam* yang menasar pemerintah dan masyarakatnya. Untungnya dengan sikap tegas pemerintah dan didukung oleh *Nabdatul Ulama* dan Muhammadiyah, pada tanggal 19 Juli 2017 dan 30 Desember 2020, secara resmi HTI dan FPI dibubarkan sekaligus pemerintah melarang seluruh aktivitasnya karena tidak memiliki legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi biasa.¹² Keputusan terbaru Pemerintah Republik Indonesia telah resmi

⁹ Humas MenpanRB, "Menteri Tjahjo: ASN Tidak Boleh Berkaitan Dengan Radikalisme Dan Terorisme," 2021, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-tjahjo-asn-tidak-boleh-berkaitan-dengan-radikalisme-dan-terorisme>.

¹⁰ Yuyun Sunesti, Noorhaidi Hasan, and Muhammad Najib Azca, "Young Salafi-Niqabi and Hijrah: Agency and Identity Negotiation," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 8, no. 2 (2018): 173–98, <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i2.173-197>.

¹¹ Ali Ridho, "Memahami Makna Jihad Dalam Serial Film Kartun Cisform: Jihad Fi Sabilillah (Analisis Wacana Teun A. Van Dijk)," *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.29240/jdk.v4i1.873>.

¹² Ali Ridho, "SYARI'AT ISLAM DAN DILEMA DAULAH ISLAMIAH (Indonesia Cerminan Negara Madinah)" 2, no. 2 (2021): 109–31,

menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai kelompok teroris. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menko Polhukam, Mahfud MD (29/04/2021). Dalam keterangannya, Mahfud menyebutkan bahwa lebih dari 92% Rakyat Papua mendukung penuh NKRI. Hanya segelintir orang menjadi kelompok separatis dan menyebar teror ke masyarakat.¹³

Aksi teror di seluruh Indonesia, disebabkan oleh semakin terbukanya akses teknologi dan informasi media sosial, berupa Youtube, Telegram, Instagram, hingga Twitter dan Facebook.¹⁴ Dengan menengok ke belakang, konflik di negara Afghanistan membutuhkan *waktu* selama 10 tahun untuk menghimpun dan mengumpulkan pelaku teror untuk berperang melawan Uni Soviet pada tahun 1979 sampai 1989. Sementara dampak konflik di Suriah dan Iraq serta belahan dunia Islam yang lainnya, khususnya adalah ISIS untuk mengumpulkan para *jihadis* yang berasal dari seluruh dunia untuk mendirikan negara *khilafah* dan ancaman teror ke seluruh belahan dunia pada tahun 2014 hanya membutuhkan waktu 1 tahun berhasil mendatangkan 20.000 ribu orang di Suriah.¹⁵ Hal ini menjadi ancaman yang serius bagi Pemerintahan Indonesia yang notabene masyarakatnya merupakan pengguna internet terbesar nomor 6 (baca: enam) di dunia setelah Tiongkok, Amerika Serikat, India, Brazil dan Jepang, apabila tidak dilakukan pemantauan dan penyaringan secara ketat terhadap informasi, berita dan konten negatif yang mengarah kepada terorisme. Maka, penelitian ini akan mengulas lebih mendalam hubungan media massa dan digital dengan gerakan terorisme, serta bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi gejala penyebaran ideologi teror di Indonesia melalui media sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Adapaun metode kualitatif adalah model penelitian yang mendapatkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata yang tertulis maupun lisan melalui gejala sosial-masyarakat dan problem kemanusiaan yang *berhubungan* dengan terorisme. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka melalui riset literatur dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, tesis, dan skripsi. Sedangkan proses observasi dilakukan pada media digital atau online dan media massa, serta media channel youtube yang dikelola oleh pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta hingga didapatkan data-data yang menunjang dalam penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*, peneliti melakukan pendeskripsian data yang telah diperoleh dari berbagai *platform* media digital/online dan media massa serta sumber literatur yang dalam bentuk tulisan dan gambar yang menjadi satu-kesatuan dengan penelitian.¹⁶ Sehingga, hasil akhir yang diharapkan adalah peneliti mampu melakukan analisis secara optimal dan baik dalam menjawab rumusan masalah

<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/mudabbir/article/view/4138>.

¹³ Sekretariat Menkopolkam, "KKB Papua Sebagai Teroris," 2021, <http://www.youtube.com/c/KemenkoPolhukamRI>.

¹⁴ Fitriani et al., "The Current State of Terrorism in Indonesia - Vulnerable Groups, Networks, and Responses," *Centre for Strategic and International Studies*, 2018, 1–18, <https://www.csis.or.id/publications/the-current-state-of-terrorism-in-indonesia-vulnerable-groups-networks-and-responses>.

¹⁵ Santi Dwi Putri, "Cyber Terrorism: Strategi Propaganda Dan Rekrutmen ISIS Di Internet Dan Dampaknya Bagi Indonesia Tahun 2014-2019," *Journal of International Relations* 5, no. 4 (2019): 827–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jirud.v5i4.25094>.

¹⁶ Gusti Yasser Arafat, "Membongkar Isi Pesan Dan Media Dengan Content Analysis Gusti Yasser Arafat UIN Antasari Banjarmasin," *Jurnal Albadrah* 17, no. 33 (2018): 32–48, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id>.

yang telah ditetapkan.

Hasil dan Pembahasan

1. Memaknai Terorisme

Di dalam bukunya yang berjudul *Collins English Learner's Dictionary*, D.J. Carver, Wallace and John Cameron memberikan makna kata teror berasal dari bahasa Latin, *ter'or less*, yang mempunyai arti rasa ketakutan (*fright*) atau rasa yang amat-sangat takut (*great fear*). *Terrorism* berarti *policy of getting what one wants in politic by using murder*. Kemudian, teror juga berarti *extreme fear* (ketakutan yang memuncak), *one who excites extreme fear* (seseorang yang mengalami kegelisahan sebab ketakutan yang mendalam), *the ability to cause such fear* (kemampuan yang menumbuhkan ketakutan), atau dimaknai sebagai *the systematic use of violence, as murder, by a party or faction to maintain power, promote, politica*.¹⁷

Terorisme dikenal sebagai suatu model aksi kekerasan yang dikelompokkan ke dalam golongan kekerasan politik atau dinamakan juga dengan kekerasan sipil. Di dalam bukunya yang berjudul *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Poltak Partogi Nainggolan menjelaskan bahwa aksi kekerasan yang berbasis pada politik mempunyai cakupan teritorial atau jangkauan yang luas, dimulai dari bentuk aksi protes atau unjuk rasa dengan menggunakan kekerasan, pemberontakan spontan dan sporadis, pemberontakan terencana dan berkelanjutan, insurjensi, kudeta hingga mengarah kepada revolusi.¹⁸

Sementara menurut Muhammad Nur Ali dari DP2M-Dikti dan Lemlit-Untad memberikan penjaran terorisme sebagai suatu bentuk aksi penggunaan kekerasan dan kekuatan yang tidak berlandaskan kepada hukum yang legal (baca: sah) dengan tujuan melakukan pemaksaan, intimidasi, pembunuhan, dan melawan individu, masyarakat, maupun pemerintah untuk kepentingan politik atau tujuan sosial lainnya. Berikut ini akan dijelaskan beberapa istilah pemahaman sederhana yang menyangkut dengan terorisme:

- a. Terorisme adalah suatu mazhab atau aliran atau kepercayaan melalui pemaksaan kehendak dengan tujuan menyuarakan pesan dan/atau asas dengan cara melakukan tindakan ilegal yang menjurus ke arah kekerasan, kebrutalan, bahkan pembunuhan atau menghilangkan nyawa manusia.
- b. Teroris adalah pelaku atau pelaksana bentuk-bentuk terorisme, baik oleh individu, golongan, atau kelompok dengan melalui perwujudan tindakan kekerasan sampai kepada pembunuhan dengan menggunakan senjata tradisional maupun mutakhir (baca: modern).
- c. Teror adalah bentuk-bentuk kegiatan dalam rangka pelaksanaan terorisme melalui ancaman, pemerasan, agitasi, fitnah, pengeboman, perusakan atau penghancuran, penculikan, intimidasi, perkosaan, dan pembunuhan.
- d. Alat teror adalah sarana yang digunakan dalam aksi teror yang dapat berupa

¹⁷ Michalj Wallace and John Cameron D.J. Carver, "Collin English Learners's Dictionary," in *English* (William Collins and Co. Ltd, 1974).

¹⁸ Ali Martin, "Dinamika Terorisme Dan Tata Dunia Baru ; Suatu Pendekatan Security Perspective," *Dinamika Terorisme Dan Tata Dunia Baru : Suatu Pendekatan Security Perspective*, 2018, 189–99.

selebaran, telepon, bom, dan berbagai jenis senjata yang dapat menimbulkan ketakutan serta kepanikan.

- e. Tujuan terorisme adalah untuk melumpuhkan otoritas pemerintah sehingga dapat menerapkan mazhab dan/atau aliran yang dianut oleh kelompok terorisme.¹⁹

James Adams dalam *Financing of Terror: How The Groups That are Terrorizing The World Get The Money To do It*, memberikan pemaknaan terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, bila tindakan-tindakan terorisme dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan, atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar dari korban-korban langsungnya. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbuhkan rezim-rezim tertentu untuk mengoreksi keluhan kelompok/nasional atau untuk menggerogoti tatanan politik internasional yang ada. Kemudian, menurut Dirjen Perlindungan HAM Departemen Kehakiman dan HAM mendefinisikan terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan yang tidak sah melawan orang atau properti untuk mengintimidasi atau menekan suatu pemerintahan, masyarakat sipil, atau bagian-bagiannya, untuk memaksakan tujuan sosial atau politik.

Dalam Pasal 1 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (sekarang sudah disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme), terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda, dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas sehingga terjadi kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, kebutuhan pokok masyarakat, lingkungan hidup, moral peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.²⁰

Dalam perspektif media massa, definisi terorisme dikemukakan oleh Walter Laquer di dalam bukunya yang berjudul *The Age of Terrorism*, menyatakan bahwa:

- a. Tindakan dan ancaman kekerasan, baik oleh individu ataupun kelompok, untuk merongrong keamanan politik legal.
- b. Penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dalam situasi sarana-sarana propaganda dan penyampaian pendapat lainnya masih ada (dalam masyarakat demokratis).
- c. Kekerasan bermotif politik yang dilakukan oleh kelompok minoritas tanpa menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan kemungkinan jatuhnya korban tidak bersalah.
- d. Tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan politik dengan cara-cara ilegal.²¹

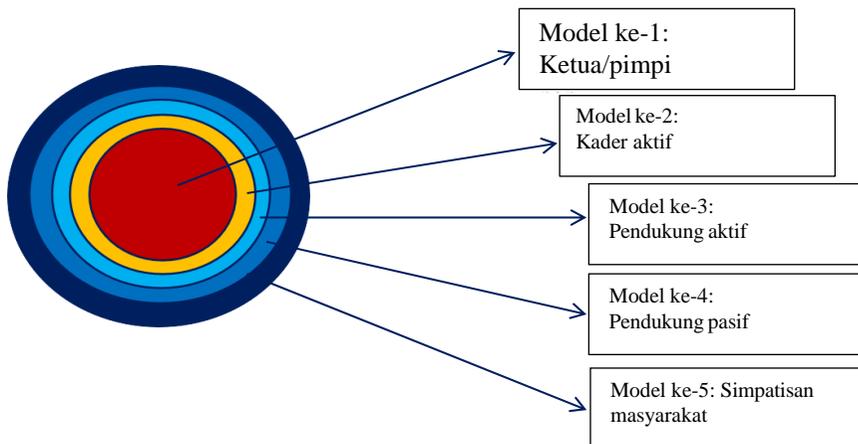
M.N. Ali di dalam jurnalnya dengan judul *Terorisme: Telaah Sosiopsikologis pada Komunitas Konflik* menggambarkan struktur anatomi terorisme dengan melakukan klasifikasi berjumlah 5 (baca: lima) model sebagai berikut:

¹⁹ Muhammad Nur Ali, "Studi Terorisme Di Sulawesi Tengah" 16, no. 2 (2016): 496–516, <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/au.v16i2.157>.

²⁰ Ayu Wardani, "Peran Media Dalam Pemberitaan Terorisme," *Jurnal Ilmiah Syiar* 17, no. 1 (2017): 29–36, <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/syiar/article/view/903>.

²¹ Walter Laquer, *The Age of Terrorism* (Boston: Little Brown, 1987).

- a. Model pertama adalah ketua atau pemimpin pergerakan terorisme yang dikelilingi para teroris eksekutor yang berdedikasi tinggi, yang kesetiannya tidak diragukan lagi. Mereka acapkali menerima kewenangan dari pimpinan untuk urusan operasional, termasuk melakukan eksekusi. Salah satu di antara mereka kelak akan menjadi pemimpin/ketua kelompok terorisme.
- b. Model kedua adalah kader aktif yang merupakan bagian dari organisasi terorisme yang masih dalam proses pematangan. Kader aktif pada umumnya telah siap melaksanakan tugas-tugas eksekusi pada sasaran-sasaran tertentu. Kader aktif inilah yang merupakan pelaku lapangan yang sesungguhnya dan merupakan orang-orang pilihan yang secara doktriner telah mampu menghayati ideologi gerakan teroris.
- c. Model ketiga adalah pendukung aktif yang memiliki tugas intelijen dan pendistribusian logistik serta mengumpulkan dana dan data. Fungsi utama model ketiga ini adalah sebagai jembatan integrasi yang menghubungkan kepentingan dan kebutuhan model kedua.
- d. Model keempat merupakan pendukung pasif yang terdiri dari pihak yang membantu tugas-tugas pendukung aktif. Mereka sering mendapatkan pertanyaan perihal informasi serta dimintai logistik dan dana untuk kepentingan kelompok aksi teror. Pendukung pasif adalah orang-orang yang tidak melakukan kontak langsung dengan kader aktif di lapangan sehingga keberadaan mereka tidak mudah teridentifikasi.
- e. Model kelima atau yang terakhir adalah simpatisan sari kalangan anggota masyarakat. Meskipun para simpatisan tidak memberi kontribusi nyata dan berperan secara aktif, pada dasarnya mereka setuju dan mendukung terorisme.²²



Gambar 1
Model Struktur Anatomi Terorisme

Terorisme dalam berbagai aspek telah menimbulkan gejala di tengah

²² Muhammad Khairil, "Perilaku Komunikasi Terpidana Kelompok Terorisme," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 10, no. 2 (2012): 117–33, <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=256818>.

kehidupan sosial masyarakat, termasuk kehidupan sosial keagamaan. Sebagai contoh analisis efek media tentang pemberitaan terorisme, khususnya dikaitkan dengan organisasi pergerakan Islam, menunjukkan media massa telah memberi pengaruh yang besar terhadap organisasi-organisasi keagamaan yang ada. Pengaruh dan efek media akibat pemberitaan terorisme dapat terlihat pada perubahan kognisi, afeksi, dan perilaku, terakumulasi dalam aktivitas gerakan organisasi. Perubahan aktivitas organisasi, misalnya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, terlihat dari pernyataan-pernyataan sikap mereka terhadap berbagai tindak terorisme. Secara intensif kedua organisasi terbesar di Indonesia tersebut sangat reaktif dan responsif terhadap isu-isu terorisme yang selama ini selalu diidentikkan dengan organisasi Islam.²³

Secara internasional, organisasi terorisme dalam pandangan Suradji, dapat dibedakan dalam tiga kategori:

- a. *Nonstate-supported groups*, diartikan sebagai teroris kelompok kecil yang memiliki kepentingan khusus dan tidak didukung oleh pemerintah, bahkan mereka sangat anti kepada pemerintah. Misalnya, kelompok anti kebijakan pemerintah atau anti korupsi. Kelompok ini biasanya mengangkat permasalahan dalam berbagai bentuk sabotase terhadap kepentingan umum dan sangat membahayakan orang lain yang tidak bersalah.
- b. *State-supported groups*, merupakan teroris yang mendapatkan latihan khusus, persenjataan, pasokan logistik, dan dukungan administrasi dari negara asing.
- c. *State-directed groups*, merupakan teroris yang diorganisasi langsung oleh negara. Pada tahun 1984, Iran telah mengembangkan sekitar 2.500 personel yang dikenal dengan nama Special Forces sebagai sebuah taktis utama dalam rangka penyebaran paham Islam fundamentalis.²⁴

Godfrey Garner dan Maeghin Alarid-Hughes dalam bukunya *The Rise of the World's Most Formidable Terrorist Groups* membuat sebuah kesimpulan bahwa terorisme yang bernuansa ideologis bukanlah wabah *sui generis* atau keunikan yang tidak diketahui asal-usulnya, bukan juga serangan kemanusiaan yang acak dan tidak dapat dijelaskan, bukan pula produk dari orang-orang yang mentalnya kacau. Terorisme ideologis merupakan suatu bentuk perjuangan untuk menghapus dikotomi prinsip yang sangat mendasar bagi sebagian kelompok masyarakat. Protes delegitimasi yang mendasari terbentuknya terorisme ideologis dapat dibedakan dalam tiga tahap, yaitu tahap krisis kepercayaan, konflik legitimasi, dan krisis legitimasi. Dikatakan bahwa setiap tahapan menunjukkan identitas psikopolitik kolektif tertentu yang dicapai oleh suatu kelompok yang termotivasi secara ideologis.²⁵

Secara ideologis, seseorang atau kelompok orang dapat terpanggil secara psikologis dan terdorong secara sosiologis untuk melakukan pergerakan. Mereka dapat digolongkan sebagai terorisme ideologis. Partisipasi individu melalui solidaritas

²³ Ade Nurwahyudi and Ahidul Asror, "STRATEGI DAKWAH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DALAM MENANGKAL RADIKALISME DI KABUPATEN BONDOWOSO" 3, no. 2 (2020): 249–72, <https://jurnalpasca.iain-jember.ac.id>.

²⁴ Adjie Suradji, *Terorisme* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005).

²⁵ Maeghin Alarid-Hughes Godfrey Garner, *Origins of Terrorism The Rise of the World's Most Formidable Terrorist Groups* (Boca Raton: CRC Press, 2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003170129>.

kesamaan ideologis berbeda-beda menurut kondisi perseorangan. Ada yang sekadar bersimpati, sebagai pendukung pasif dan aktif, ada pula yang yang menjadi kader, serta sebagai pelaku teror aktif. Obsesi perjuangan mereka sebagai teroris ideologis adalah untuk mewujudkan sebuah perubahan tatanan, tetapi dampak proses perjuangannya, khususnya bagi masyarakat luas, sangat merugikan. Aksi bom bunuh diri, peledakan tempat-tempat ibadah dan umum, aksi penembakan dan pembunuhan, serta berbagai teror di tengah masyarakat semata ingin menyampaikan pesan perjuangan untuk mewujudkan ideologi sesuai dengan apa yang mereka yakini dan harapkan.

Jejaring terorisme juga terorganisasi dengan baik melalui pola rekrutmen anggota kelompok secara doktriner melalui kajian-kajian keagamaan dengan paham radikal. Pada umumnya, doktrin agama dimaknai sebagai upaya konsistensi dalam perjuangan menegakkan ideologi dengan klaim kebenaran kelompok sebagai kebenaran mutlak. Fanatisme keyakinan ideologis telah mengabaikan semangat toleransi dan hilangnya budaya komunikasi telah menjadikan anggota kelompok teroris sebagai orang-orang yang militan dan siap untuk “mati” demi menegakkan perjuangan ideologi sesuai yang mereka cita-citakan.

2. Media Digital dan Terorisme

Gelombang informasi yang kian deras merupakan manifestasi dan melesatnya kemajuanteknologi informasi. Jenis dan kualitas saluran informasi berubah dari waktu ke waktu dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Implikasinya kemudian adalah menipisnya batasan-batasan sistem, budaya, dan hukum komunikasi yang ada di masing-masing negara.

Revolusi teknologi komunikasi telah membuat dunia semakin kecil karena berhasil menjadikan seluruh peristiwa di seluruh penjuru dunia menjadi ruang publik (*public space*) yang bisa diakses tanpa dibatasi ruang dan waktu. Peristiwa terorisme yang mengguncang kawasan Timur-Tengah, Eropa, hingga Asia seperti Afganistan, Pakistan, Filipina dan bahkan Indonesia sendiri, dapat dengan mudah dan cepat diakses oleh pemberitaan media massa dan digital secara global sebagai konsekuensi logis dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Konsekuensi logis yang lainnya dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah bahwa peristiwa terorisme yang melanda berbagai belahan dunia tidak hanya berdampak kepada satu tatanan keseimbangan suhu politik, namun merambah kepada agama, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lainnya.

Maraknya aksi teror bom dan aksi kekerasan menjadi fenomena baru yang muncul pada era digitalisasi media. Gedung pemerintah, gedung swasta, tempat-tempat umum, hingga rumah ibadah menjadi sasaran aksi teror. Korban jiwa berjatuhan, baik anak-anak, orang dewasa, laki-laki, maupun perempuan. Masyarakat merasa khawatir dan ketakutan terhadap kondisi keamanan dan keselamatan diri mereka sendiri. Belum lama di Indonesia terjadi rentetan aksi teror dalam bentuk pengeboman rumah ibadah di Makassar, penyerangan markas kepolisian, hingga pembunuhan yang dilakukan oleh teroris di Poso dan Puncak Jaya, Papua.

Weiviorla sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Khairil memberikan penjelasan mengenai empat konsep hubungan antara media dan terorisme:

1. *Pure indifference*, merupakan teroris yang tidak ingin menakut-nakuti kelompok populasi sasaran di luar korban-korban mereka ataupun tindak hendak

- merealisasikan kudeta propaganda melalui aksi terorisme mereka.
2. *Relative indifference*, merupakan aksi kekerasan yang tidak semata-mata beorientasi pada media, tujuannya tidak untuk mempertontonkan aksi atau menarik perhatian media massa atau digital.
 3. *Media oriented strategy*, yaitu tindakan terorisme hasil perhitungan yang matang mengenai perilaku media massa dan digital. Pada tingkat taktik, mereka bermain-main dengan kebingungan di kalangan masyarakat atau pemerintah.
 4. *A total break with broader community*, jurnalis atau media massa yang menjadi musuh bagi teroris.²⁶

Dalam keempat uraian di atas dapat dibuktikan dengan bentuk aksi terorisme yang dilakukan oleh pelaku teror di Kawasan Timur-Tengah dan Afrika, sebagaimana diketahui jurnalis dari berbagai belahan dunia berkumpul dan mencari, mengolah dan menyebarkan pemberitaan mengenai aksi-aksi teror yang dilakukan oleh mereka. Selain itu para kelompok teror telah memperhitungkan dengan matang bahwa mereka berada di kawasan yang mampu dipotret dengan menggunakan citra satelit karena kawasan geografisnya yang terbuka dan tidak dilindungi oleh lebatnya pepohonan hutan. Kemudian, aksi terorisme yang paling mengejutkan di abad ini adalah serangan Israel yang menyasar masyarakat Palestina di Jalur Gaza dan sekitar Masjid Al-Aqsa dengan alasan membalas dendam terhadap kelompok Hamas. Ketika dunia telah menjadi era media massa dan digital, tindakan para teroris seperti mendapatkan kendaraan yang tepat dan menjadi pesan yang harus tersebar luas secara masif dan cepat.²⁷

Dalam perspektif media global, peristiwa teror dan pelakunya menjadi bahan berita yang menarik bagi media. Fenomena teroris di Puncak Jaya, Jamaah Islamiyah di Poso dan Makassar menjadi materi berita yang dieksploitasi oleh media di Indonesia dan belahan dunia. Media dan terorisme memiliki kaitan erat dalam hubungan simbiosis mutualisme, maksudnya terorisme membutuhkan publikasi dalam setiap aksinya dan media membutuhkan pemberitaan yang “seksi” untuk dieksploitasi serta menjadi komoditas menarik dan menguntungkan bagi para konsumen media. Sebagai contohnya adalah kasus pembunuhan dan pembakaran terhadap warga dan rumah ibadah di Poso yang dilakukan oleh kelompok Ali Kalora Cs., yang saat ini masih diburu oleh Satgas Tinombala. Dalam tatanan teoritis, hal tersebut dinamakan *a violent communication strategy*, pelaku teror bertindak sebagai *sender*, para korban menjadi *message generator*, sedangkan *receiver* adalah kelompok yang dianggap musuh atau publik secara luas.²⁸

Media dan terorisme mempunyai hubungan. Karena tanpa publisitas dari media massa dan digital, aksi teror mereka tidak mencapai target maksimal untuk memperoleh perhatian, mendemonstrasikan kemampuannya, merongrong dan

²⁶ Muhammad Khairil, “Strategi Komunikasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Korban Konflik Poso,” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 9 (2011): 267–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.31315/jik.v9i3.3436>.

²⁷ Kiagus Zaenal Mubarak, “Pembuktian Israel Sebagai Pelaku State-Terrorism,” *Padjadjaran Journal of International Relations* 2, no. 1 (2020): 54, <https://doi.org/10.24198/padjir.v2i1.27365>.

²⁸ Dzikrina Asqha Mahardika, “Communication Strategy For Women Organizations In Minimizing Female Violence During Pandemic,” *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)* 5, no. 1 (2020): 41–58, <https://doi.org/10.18326/inject.v5i1.41-58>.

merusak citra pemerintahan, atau menarik dukungan terhadap perjuangan para teroris. Publikasi tindak teroris melalui media massa dan digital merupakan upaya para teroris memanfaatkan media untuk mendapatkan efek nyata dari tindakan mereka. Tidak hanya penggunaan aktif media massa dan digital bagi kelompok teroris, mereka juga menggunakan media secara pasif.

Penggunaan media secara pasif oleh kelompok teroris adalah sebagai jaringan komunikasi eksternal di antara teroris, mempelajari teknik-teknik penanganan terbaru terhadap terorisme dari laporan media massa dan digital, mendapatkan informasi tentang kegiatan terkini kebijakan pemerintah, termasuk strategi penanganan kelompok teroris dari pihak keamanan, menikmati laporan media yang berlebihan tentang kekuatan teroris sehingga memberikan efek ketakutan di kalangan masyarakat dan ini juga bagian dari target kelompok teroris. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah kelompok teroris melalui media massa dan digital akan mampu mengidentifikasi target-target mereka selanjutnya dan terus berupaya memperoleh informasi tentang reaksi publik terhadap aksi-aksi mereka.

Fakta lainnya dari hubungan antara media dan terorisme tidak hanya tampak pada penggunaan media untuk kepentingan para teroris, tetapi media juga menggunakan teroris untuk kepentingan mereka. Dalam analisis yang dilakukan oleh Cot, dalam jurnal *Media dan Kekerasan Berlatar Agama (Urgensi Praktik Jurnalisme Damai)*, bahwa media menggunakan teroris untuk kepentingan mereka dalam konteks *exacerbating factors: competition and speed*.²⁹ Kompetisi dan kecepatan menuntut media untuk bisa bekerja dengan lebih baik agar mampu bersaing. Dalam kompetisi, materi berita yang menarik akan menentukan kemampuan untuk menarik perhatian dan minat publik. Kecepatan menuntut media untuk mendapatkan berita dari sumber pertama dengan tempo yang singkat. Tindakan teroris menjadi materi informasi yang sangat menarik, tetapi juga butuh kecepatan untuk dapat menyiarkannya, sehingga media berlomba-lomba untuk mendapatkan kesempatan pertama dalam pemberitaan terorisme.

Relasi antara kepentingan propaganda teroris dan kepentingan nilai berita dari media pada akhirnya membentuk saling ketertgantungan antara satu dan yang lainnya. Tanpa media, terorisme tidak akan mencapai target yang optimal, sebaran informasi mereka akan sangat terbatas. Sebaliknya, media akan sangat menggantungkan informasinya pada berbagai isu tentang terorisme sebagai modal komoditas yang dapat dieksploitasi.

Kecurigaan terhadap adanya interdependensi teroris dan media dapat terindikasi pada kelompok teroris yang mencari perhatian media untuk sebisa mungkin mendapatkan penerimaan publik. Kelompok teroris kerap mengusung “sensasi” sebagai nilai berita yang mereka manipulasi untuk tujuan propaganda. Gatung bersambut, media menerima bentuk simbiosis mutualisme ini demi untuk mendapatkan sensasi berita dan yang lebih utama adalah menjadi *leading newspaper* terhadap kompetitornya. Pada tataran ideal, tentu saja media memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga dan ikut memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat. Peran media dalam pemberitaan terorisme diharapkan tidak menimbulkan eksese negatif bagi publik.

²⁹ Lukman Hakim, “Peace Journalism Transmissions in Case of Papua Students By ‘Nu Online,’” *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 6, no. 1 (2021): 159–212, <https://doi.org/10.22515/al-balagh.v6i1.2097>.

3. Tanggung Jawab Media dalam Pemberitaan Teror

Beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan oleh awak media dalam proses peliputan tindak terorisme adalah:

1) *The critical imperative*

Dalam kasus pemberitaan terorisme, media yang hanya mengedepankan faktor bisnis atau eksploitasi dengan pertimbangan komoditas tidaklah pantas dilakukan. Media harus mampu memberikan masukan bagi pemerintah dan masyarakat mengenai bagaimana sebaiknya menyikapi berbagai tindakan terorisme.

2) *Interviewing terrorist*

Dalam berbagai kesempatan, terkadang para pelaku teror, khususnya yang menjadi terpidana, memberikan ruang bagi awak media untuk melakukan wawancara. Fakta yang sering terjadi adalah jurnalis yang melakukan wawancara dengan para pelaku teror seringkali tidak sadar telah masuk dalam pemahaman ideologi mereka. Empati, toleransi, pengertian, dan ketertarikan yang muncul dalam proses wawancara secara perlahan menggiring jurnalis ketika menuliskan berita tentang teroris.

3) *Moral obligations of reporting*

Pentingnya aspek moral dari jurnalis, editor, penyiar, dan awak media lainnya ketika memberitakan kasus terorisme. Awak media harus mempunyai kesadaran bahwa realitas yang mereka liput, materi wawancara, dan kronologi yang mereka beritakan akan memberiefek bagi konsumennya.³⁰

Dalam kajian jurnalisme, informasi atau berita atau konten yang disajikan oleh media bukanlah seratus persen fakta utuh, melainkan fakta yang telah terseleksi sebelumnya dan disebut sebagai realitas media. Dalam percaturan opini publik, persoalan yang sering muncul adalah indikasi adanya kebohongan media dalam menyampaikan fakta. Akibatnya, masyarakat menerima fakta bukan sebagaimana adanya, melainkan apa yang mereka anggap sebagai fakta. Jadi, terdapat kesenjangan antara fakta sebenarnya dan “apa yang dianggap sebagai fakta”.³¹

Dalam konteks kajian media, upaya penciptaan realitas imajiner dalam sajian media massa dan digital sering disebut simuklara (*symulacrum*) artinya suatu model realitas yang seakan-akan nyata, tetapi sesungguhnya merupakan rekayasa media. Fakta atau realitas yang sebenarnya tersembunyi di balik citra realitas (*image of reality*) sedemikian rupa sehingga antara realitas dan citra realitas, antara fakta semu dan fakta sesungguhnya, tidak dapat dibedakan. Simuklara adalah bagian dari konsekuensi adanya proses penyeleksian (*gatekeeping*) di media.³²

Dalam pemberitaan terorisme yang disajikan oleh media, perlu dipahami bahwa berita terorisme sama saja dengan memahami sebuah produk teks. Publik dapat melihat bagaimana realitas empirik tentang terorisme ditampilkan dalam berita.

³⁰ Kusnurul Rahayu et al., “Memahami Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik Pada Media Online (Studi Etnografi Pada Kantor Redaksi Portal Berita Online Jateng.Tribunnews.Com),” *Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Diponegoro* Jl. 2, no. 1 (2016): 12.

³¹ Khairil, “Strategi Komunikasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Korban Konflik Poso.”

³² Theguh Saumantri and Abdu Zikrillah, “Teori Simulacra Jean Baudrillard Dalam Dunia Komunikasi Media Massa,” *ORASI: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 11, no. 2 (2020): 247, <https://doi.org/10.24235/orasi.v11i2.7177>.

Ketika menyajikan berita terorisme, media dipengaruhi oleh seperangkat pemahaman, nilai, dan ideologi yang dianut sehingga media memiliki tendensi-tendensi yang pada akhirnya disebarluaskan kepada publik.

4. Terorisme dan Jurnalisme Empati

Semua media memiliki *agenda setting* masing-masing, sesuai dengan target pemasarannya. Ada pemberitaan media yang kritis terhadap perkembangan terorisme, dan mengkritik keras pelaku dan aksi teror. Ada media yang model pemberitaannya netral, tidak memihak, tetapi tetap memberikan solusi secara akal sehat. Ada pula media yang pemberitaannya cenderung tendensius dan menghakimi salah satu pihak, bahkan mirip media partisan. Semua media tersebut berada dalam *frame* kapitalis yang hanya mampu tunduk pada pasar. Penulis menyadari sepenuhnya jika perusahaan pers dimana media bernaung adalah produk informasi. Jadi mereka harus bisa mengemas informasi menjadi sebuah produk yang bernilai jual dan dibutuhkan konsumen.³³

Meskipun demikian, media perlu berempati pada kondisi negara yang sedang mengalami permasalahan radikalisme dan terorisme, serta diperburuk dengan terpaan pandemi covid-19. Media massa dan digital perlu memberikan *supporting* kepada publik, salah satunya mendorong solidaritas publik untuk saling mengulurkan tangan, saling menjaga, saling memberikan pemahaman atau edukasi bahaya laten terorisme. Aspek solidaritas publik melalui komunikasi empati dinilai menjadi modal yang penting untuk terus dirawat dan dikembangkan.³⁴ Gerakan yang berawal spontan, menuju menjadi gerakan yang lebih terstruktur dan tepat sasaran.

Para pemangku kebijakan (*stakeholder*) sudah seharusnya juga bisa melihat dengan kacamata potensi, merangkul, dan mendukung setiap gerakan yang muncul demi keberhasilan mengatasi paham/ideologi dan aksi terorisme. Langkah bijak yang harus dilakukan oleh media adalah dengan terus memberikan dukungan terlepas dari keterbatasan penanganan terorisme di tengah-tengah pandemi covid-19 dan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh bangsa ini, mulai kasus korupsi, pemerataan pendidikan, kesenjangan sosial-ekonomi, dan lainnya. Bukan waktunya untuk saling kritik dan menyalahkan. Membangun komunikasi empati untuk memberikan ketenangan publik adalah hal yang perlu dilakukan oleh media massa dan digital.

Meredam kepanikan sekaligus bisa ikut mengambil peran sekecil apapun. Komunikasi empati menurut Idi Subandi Ibrahim, diartikan sebagai model komunikasi yang menempatkan

diri kita pada posisi orang lain. Ikut secara intelektual dan emosional dalam pengalaman orang lain. Berempati dengan demikian membayangkan diri kita pada kejadian yang menimpa orang lain. Berusaha melihat seperti orang lain lihat, merasakan seperti orang lain merasakannya.³⁵ Lembaga Pers Nasional pernah memberikan pengarahannya untuk menyiarkan beragam fakta pemberitaan yang berimbang, akurat, dan selalu menguji informasi, termasuk menghindari pemuatan laporan yang hanya menambah kenapikan publik.³⁵

³³ What Is Ideology, "Media and Ideology," *Power and Inequality: Critical Readings for a New Era: Second Edition*, 2021, 177–80, <https://doi.org/10.2307/j.ctvqhtgc.14>.

³⁴ Ali Ridho, "Kritik Dan Distorsi Komunikasi Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19, Bagaimana Seharusnya?," *ORASI: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 13, no. 1 (2022): 134, <https://doi.org/10.24235/orasi.v13i1.8367>.

³⁵ Nurul Islamiyah, "DEMOKRATISASI KOMUNIKASI DENGAN EMPATI (Studi

Meski dalam pelaksanaan di lapangan, memang bergantung kepada kondisi situasional. Secara umum, usaha membangun jurnalisme makna dengan membangun harapan dan optimisme publik, menjadi sebuah peran penting yang perlu diapresiasi. Sementara komunikasi empati publik, tidak perlu diragukan lagi keadaannya. Komunikasi empati publik mampu kita saksikan melalui media massa/digital lainnya. Warganet dengan sukarela saling memberikan dukungan, edukasi, pemahaman, himbuan, informasi mengenai beragam usaha agar ideologi dan aksi terorisme di tanah air tidak berkembang dan berulang kembali.

5. Langkah Pemerintah Meminimalisir Konten Terorisme

Pelaku teror di Indonesia mengalami arus pergeseran yang signifikan, saat ini pelakunya rata-rata masih berusia produktif. Pergeseran pelaku aksi teror dari mulanya orang dewasa menuju anak-anak muda, perempuan, bahkan melibatkan anak-anak. Fenomena tersebut bisa dinamakan dengan *millenialisasi kelompok teror* yang telah berhasil menyusupkan paham radikalisme dan terorisme melalui media internet dan media sosial. Jaringan teroris mampu menggunakan media sosial untuk kepentingan penggalangan dana, rekrutmen anggota dan simpatisan baru, mempengaruhi, dan mengajak terutama anak-anak remaja. Bahkan bukan hanya berhenti disitu, dalam memberikan materi berupa penyerangan dan pengeboman organisasi teroris juga memanfaatkan jalur media massa/digital. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa anak-anak muda saat ini menjadi sasaran lunak untuk menyebarkan ideologi terorisme?

Dalam pengamatan penulis, anak-anak muda memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, aktif dalam menggunakan media sosial. Namun, kenyataannya tidak diimbangi oleh emosional yang stabil sehingga rawan untuk dilakukan ideologisasi paham-paham yang salah dan kaum millennial dinilai juga tidak terbiasa berfikir kritis dan mudah didoktrin.³⁶ Namun, di lain sisi ada indikasi generasi millennial dinilai memiliki kecerdasan yang luar biasa, sehingga anak-anak muda berpotensi untuk menjadi pembelajar mandiri (*self learner*), tergantung materi dan modul apa yang dipelajari secara mandiri tersebut. Potensi dalam melakukan pembelajaran mandiri ini pada akhirnya dikhawatirkan menjadi kunci kenapa regenerasi teror belakangan ini patut untuk diantisipasi dengan serius.

Berbeda dengan masa silam, dimana pelaku teror harus dicuci otaknya dan didampingi secara intensif, dan diharuskan masuk ke markas atau sekolah kelompok teroris tertentu. Namun kenyataan pada hari berbanding terbalik, mereka mampu melakukan 2 (dua) mekanisme secara mandiri yaitu *pertama*, meradikalisasi pemikiran atau ideologi kekerasan secara mandiri tanpa bantuan dari siapapun. *Kedua*, mereka melakukan sumpah setia untuk operasi kekerasan. *Self radicalication* dan *self recruitment* menunjukkan bahwa kaum muda memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa.

Media sosial menjadi adalah wilayah *surgawi* bagi generasi muda negeri ini. Sebab, disana mereka mampu sepenuhnya dan leluasa mungkin untuk berselancar

Eksplorasi Pada Pemikiran Idi Subandy Ibrahim Terkait Kajian Komunikasi Indonesia) SKRIPSI” (Universitas Brawijaya, 2018), http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163702/1/Nurul_Islamiyah.pdf.

³⁶ Syahidah Rena and Iredho Fani Reza, “Psychological Approach on Religious Extremism, Why Are the Youth at Risk,” no. 2019 (2020): 1–4, https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simlitbang/spdata/upload/policy_brief/1616474999syahidah.a.pdf.

bebas memilah dan memilih mana informasi/konten yang mereka gemari dan mana yang tidak disukai. Dikhawatirkan manakala mereka semakin candu dan mengacu kepada *referensi-referensi* jahat akan membuat mereka sulit untuk keluar, sebab mereka berada dalam dunia itu sendirian. Hal lain yang perlu menjadi perhatian serius adalah manakala narasi-narasi kekerasan tumpah-ruah di media sosial atau jagad maya, pada saat yang sama kita belum sungguh-sungguh berhasil menjadikan potret keberhasilan kita berideologi dalam kontek berbangsa dan bernegara. Jika kondisinya tumpang sedemikian rupa, maka menjadi masuk akal apabila kemudian anak-anak muda lebih tertarik dan candu kepada tawaran-tawaran nilai dan ideologi yang seolah memberikan janji-janji kemenangan dalam bingkai kesemuan belaka.

Dalam pandangan psikologis anak muda, mereka diketahui memiliki kecenderungan untuk *menyerempet* kepada hal-hal yang berbahaya. Informasi dan konten yang berhubungan dengan kedahsyatan, kekuatan, keperkasaan, membangkitkan adrenalin, membangkitkan gairah kepahlawanan, kesemuanya yang dicari dan digemari oleh anak-anak muda yang gemar berpetualang.³⁷ Persoalannya, sanggup atau tidak kita melakukan kontra narasi dengan menyajikan bukti-bukti keberhasilan dalam berideologi yang dinilai masih sulit untuk dilakukan, otomatis akan sulit juga memenangkan hati kalangan muda (*millennial*). Ditemukan fakta lain bahwasannya dalam sebuah survey yang dilakukan oleh *Varkey Foundation* pada tahun 2017, generasi *millennial* Indonesia memiliki komitmen terhadap agama yang paling tinggi di atas rata-rata dunia 44%. Indonesia mendapatkan peringkat pertama dengan angka 93%, disusul oleh Nigeria 86%, Turki 71%, Afrika Selatan 70%, dan Brasil 70%.³⁸

Kemudian muncul pertanyaan selanjutnya, apakah proses deradikalisasi oleh pemerintah selama ini tidak optimal dan *kuno* ketika perubahan informasi dan teknologi media? Titik tolak dari sebuah asumsi bahwa sekarang medan perang, wilayah perekrutan, wilayah cuci otaknya adalah di dunia maya, maka program deradikalisasi harus menjadikan dunia maya sebagai fokus utama. Pemerintah harus bekerja dengan fokus *big data* dengan melakukan pemantauan secara kontinu dan dilaksanakan pergerakan untuk memastikan berbagai narasi dan informasi-informasi yang negatif dan berpotensi menimbulkan kegelisahan dan berujung kepada kejahatan di masyarakat.

Literasi media sosial juga dinilai mempunyai peranan penting bagi generasi muda agar tidak mudah terpapar informasi dan konten radikalisme dan terorisme. Presiden Jokowi dalam hal ini telah meluncurkan Program Literasi Digital Nasional Tahun 2021, dengan tujuan meningkatkan kecakapan digital masyarakat untuk menciptakan iklim konten yang positif, mendidik, menyejukkan, dan menyerukan perdamaian, serta mengecilkan dan mendegradasi konten-konten bernilai negatif berupa ujaran kebencian, hoaks, radikalisme dan terorisme. Pencegahan terorisme juga harus dimulai dari sel terkecil yaitu keluarga. Lingkungan sekitar juga mampu menjadi benteng bagi generasi muda agar bibit terorisme tidak menjadi racun bagi generasi penerus bangsa. Pemerintah dan masyarakat harus mampu membangun

³⁷ Lailatur Rofidah and Abdul Muhid, "Media Dan Hibrid Identitas Keagamaan Di Era Digital," *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 7, no. 1 (2022): 81, <https://doi.org/10.29240/jdk.v7i1.4805>.

³⁸ Emma Broadbent et al., "Generation Z: Global Citizenship Survey: The Varkey Foundation," 2017, <https://www.varkeyfoundation.org/media/4487/global-young-people-report-single-pages-new.pdf>.

semangat dan optimisme dalam memenangkan pertarungan panjang yang berjalan hampir 22 tahun.

Penutup

a. Kesimpulan

Pemerintah memerlukan kerja sama dan dukungan publik, termasuk media massa dan digital dalam usaha meminimalkan penyebaran ideologi dan aksi terorisme, serta untuk menangkap sekaligus menghukum para pelaku teror. Fakta bahwa media sesungguhnya berada dalam pusaran realitas sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan dan konflik yang beragam. Liputan media yang disajikan untuk publik, bukanlah hal alamiah. Namun dihasilkan oleh kerja tangan dan pikiran redaksional yang menghadirkan realitas dalam wajah lain. Namun, media juga harus mampu menciptakan iklim jurnalisme yang sehat untuk dapat memberikan edukasi dan pemahaman kepada publik, serta memiliki empati terhadap korban terorisme ideologi dan aksi teror.

Paham terorisme telah menyusupi generasi muda melalui media sosial. Literasi media digital dinilai menjadi senjata ampuh yang mampu dilakukan oleh pemerintah untuk melawan narasi-narasi negatif yang menyasar dan menargetkan generasi milenial untuk tujuan ideologisasi, perekrutan, dan aksi teror oleh organisasi terorisme. Pemerintah juga perlu melakukan langkah antisipatif dengan melakukan pemantauan dan penindakan terhadap informasi-informasi yang berhaluan memunculkan kepanikan dan ketakutan publik. Peran serta lingkungan keluarga dan masyarakat juga penting dalam menenangkan hati dan pikiran generasi millennial dengan menanamkan nilai-nilai ideologi beragama yang moderat, berbangsa, dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Saran

Strategi dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) khususnya dan seluruh komponen negara secara umum harus dilaksanakan secara masif dan berkelanjutan. Tatanan dunia dalam menyebarkan dan memperoleh informasi-berita telah berubah dari awalnya berupa melalui media cetak berubah ke media massa dan pada saat ini telah memasuki era digitalisasi media. Para organisasi terorisme yang notabene mengusung ideologi impor yang tidak sesuai dengan masyarakat dan negara Indonesia harus mampu ditekan sedemikian rupa tanpa harus menunggu komando dari panglima tertinggi negara yaitu presiden. Selain itu, pencegahan dan pengikisan ideologi-ideologi radikalisme dan terorisme juga jangan sampai memanfaatkan perubahan peta politik menjelang datangnya pemilihan umum datang, sehingga seakan-akan ada tendensi stigma dari masyarakat perang terhadap terorisme merupakan agenda politis dari pemerintah terhadap para barisan oposisi. Padahal secara jelas dan terang bahwa aksi terorisme merupakan suatu agenda dan aksi nyata yang mengancam kedaulatan dan keamanannasional.

Selain itu, sudah tiba masanya untuk para pengiat media sosial dan digital yang memiliki basis masa (pengikut) dengan jumlah ratusan ribu hingga jutaan mempunyai kesadaran untuk menciptakan kampanye, narasi, konten yang sifatnya adalah edukasi yang berkelanjutan akan bahayanya radikalisme, khususnya bagi para generasi muda. Narasi dan konten yang menyejukkan menjadi senjata untuk melawan narasi dan konten negatif radikalisme yang sengaja dibuat dan disebarkan oleh

gerakan transnasional kiri maupun kanan. Kemudian, Indonesia yang tengah menikmati bonus demografi penduduknya yang dihuni oleh mayoritas usia muda (generasi Z dan milenial) menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga dan merawat generasi yang dimilikinya untuk melanjutkan tonggak kepemimpinan di masa mendatang tanpa adanya kontaminasi dari ideologi berbahaya yang mampu diejawantahkan kepada aksi teror kepada sesama. Para peneliti dan akademisi dinilai juga mempunyai peran signifikan dalam mempublikasikan riset-riset yang berhaluan kepada moderasi agama, khususnya dalam basis media digital, sehingga dunia akademik dan literasi di Indonesia menjadi wahana yang ramah bagi perkembangan intelektual generasi mendatang.

Daftar Pustaka

- Aisy, Bilqis., Ibrahim, Dina., Intang, Khusnul., Tindage, Monique. “*Penegakan Kontra Radikalisasi Melalui Media Sosial Oleh Pemerintah Dalam Menangkal Radikalisme* Bilqis Rihadatul Aisy , Dina Oktarina Ibrahim , Khusnul Khatimah Haruna Intang , Monique Anastasia Tindage Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jalan Airlangga.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2 (2019): 1–8.
- Ali, Muhammad Nur. “*Studi Terorisme Di Sulawesi Tengah*” 16, no. 2 (2016): 496–516. <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/au.v16i2.157>.
- Amaliyah, Suci. “*Mencari Format Kebijakan Terbaik Dalam Merespons Kepulungan Wni Eks-Isis.*” *Jurnal Kajian Lembannas RI*, 2020, 61–73. www.Tribunnews.com.
- Arafat, Gusti Yasser. “*Membongkar Isi Pesan Dan Media Dengan Content Analysis Gusti Yasser Arafat UIN Antasari Banjarmasin.*” *Jurnal Albadrah* 17, no. 33 (2018): 32–48. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id>.
- BNPT. “*Kontra Terorisme Di Indonesia,*” 2020. <https://www.bnpt.go.id>.
- Broadbent, Emma, John Gougoulis, Nicole Lui, Vikas Pota, and Jonathan Simons. “*Generation Z: Global Citizenship Survey: The Varkey Foundation,*” 2017. <https://www.varkeyfoundation.org/media/4487/global-young-people-report-single-pages-new.pdf>.
- D.J. Carver, Michalj Wallance and John Cameron. “*Collin English Learners’s Dictionary.*” In *English*, 112. William Collins and Co. Ltd, 1974.
- Esterina, Firdhy Christy. “*Global Teroris Indeks 2019,*” 2020. <https://data.tempo.co/data/732/global-teroris-indeks-2019>.
- Fitriani, Alif Satria, Pricilia Putri Nirmalasari, and Rebekha Adriana. “*The Current State of Terrorism in Indonesia - Vulnerable Groups, Networks, and Responses.*” *Centre for Strategic and International Studies*, 2018, 1–18. <https://www.csis.or.id/publications/the-current-state-of-terrorism-in-indonesia-vulnerable-groups-networks-and-responses>.
- Godfrey Garner, Maeghin Alarid-Hughes. *Origins of Terrorism The Rise of the World’s Most Formidable Terrorist Groups*. Boca Raton: CRC Press, 2021. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003170129>.
- Hakim, Lukman. “*Peace Journalism Transmissions in Case of Papua Students By Nu Online.*” *Al-*

- Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 6, no. 1 (2021): 159–212. <https://doi.org/10.22515/al-balagh.v6i1.2097>.
- Haryanto, J. T. “Perkembangan Gerakan ISIS Dan Strategi Penanggulangannya (Kasus Perkembangan Awal ISIS Di Surakarta) (*The Development of the ISIS Movement and the Strategy in Handling It: The Initial Development Case of ISIS in Surakarta*).” *Harmoni: Jurnal Multikultural Dan Multireligius* 14, no. 3 (2015): 12–25.
- Ideology, What Is. “Media and Ideology.” *Power and Inequality: Critical Readings for a New Era: Second Edition*, 2021, 177–80. <https://doi.org/10.2307/j.ctvqhtgc.14>.
- Islamiyah, Nurul. “Demokratisasi Komunikasi Dengan Empati (*Studi Eksplorasi Pada Pemikiran Idi Subandy Ibrahim Terkait Kajian Komunikasi Indonesia*) SKRIPSI.” Universitas Brawijaya, 2018. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163702/1/NurulIslamiyah.pdf>.
- Khairil, Muhammad. “Perilaku Komunikasi Terpidana Kelompok Terorisme.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 10, no. 2 (2012): 117–33. <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=256818>.
- . “Strategi Komunikasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Korban Konflik Poso.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 9 (2011): 267–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.31315/jik.v9i3.3436>.
- Khan, M. A. Muqtedar, and Rifat Binte Lutful. “Emerging Hindu Rasbtra and Its Impact on Indian Muslims.” *Religions* 12, no. 9 (2021). <https://doi.org/10.3390/rel12090693>.
- Laquer, Walter. *The Age of Terrorism*. Boston: Little Brown, 1987.
- Mahardika, Dzikrina Asqha. “Communication Strategy For Women Organizations In Minimizing Female Violence During Pandemic.” *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)* 5, no. 1 (2020): 41–58. <https://doi.org/10.18326/inject.v5i1.41-58>.
- Martin, Ali. “Dinamika Terorisme Dan Tata Dunia Baru; Suatu Pendekatan Security Perspective.” *Dinamika Terorisme Dan Tata Dunia Baru: Suatu Pendekatan Security Perspective*, 2018, 189–99.
- MenpanRB, Humas. “Menteri Tjahjo: ASN Tidak Boleh Berkaitan Dengan Radikalisme Dan Terorisme,” 2021. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-tjahjo-asn-tidak-boleh-berkaitan-dengan-radikalisme-dan-terorisme>.
- Mirshak, Nadim. “The Muslim Brotherhood in Egypt: A Gramscian Re-Examination.” *Current Sociology*, 2021. <https://doi.org/10.1177/00113921211039273>.
- Mubarok, Kiagus Zaenal. “Pembuktian Israel Sebagai Pelaku State-Terrorism.” *Padjadjaran Journal of International Relations* 2, no. 1 (2020): 54. <https://doi.org/10.24198/padjir.v2i1.27365>.
- Nurwahyudi, Ade, and Ahidul Asror. “Strategi Dakwah Nabhdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Menangkal Radikalisme Di Kabupaten Bondowoso” 3, no. 2 (2020): 249–72. <https://jurnalpasca.iain-jember.ac.id>.

- Orofino, Elisa. "The Muslim Brotherhood A Contested Islamist Actor BT - *Handbook of Contemporary Islam and Muslim Lives.*" edited by Ronald Lukens-Bull and Mark Woodward, 1–19. Cham: Springer International Publishing, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73653-2_103-1.
- Putri, Santi Dwi. "Cyber Terrorism: Strategi Propaganda Dan Rekrutmen ISIS Di Internet Dan Dampaknya Bagi Indonesia Tahun 2014-2019." *Journal of International Relations* 5, no. 4 (2019): 827–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jirud.v5i4.25094>.
- Rahayu, Kusnurul, Rouli Manalu, Program Studi, Ilmu Komunikasi, and Universitas Diponegoro. "Memahami Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik Pada Media Online (Studi Etnografi Pada Kantor Redaksi Portal Berita Online Jateng.Tribunnnews.Com)." *Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Diponegoro Jl. 2*, no. 1 (2016): 12.
- Rena, Syahidah, and Iredho Fani Reza. "Psychological Approach on Religious Extremism, Why Are the Youth at Risk," no. 2019 (2020): 1–4. https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simlitbang/spdata/upload/policy_brief/1616474999syahida.pdf.
- Ridho, Ali. "Kritik Dan Distorsi Komunikasi Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19, Bagaimana Sebarusnya?" *ORASI: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 13, no. 1 (2022): 134. <https://doi.org/10.24235/orasi.v13i1.8367>.
- . "Memahami Makna Jihad Dalam Serial Film Kartun Cisform: Jihad Fi Sabilillah (Analisis Wacana Teun A. Van Dijk)." *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.29240/jdk.v4i1.873>.
- . "Syari'at Islam Dan Dilema Daulah Islamiyah (Indonesia Cerminan Negara Madinah)" 2, no. 2 (2021): 109–31. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/mudabbir/article/view/4138>.
- Rofidah, Lailatur, and Abdul Muhid. "Media Dan Hibrid Identitas Keagamaan Di Era Digital." *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 7, no. 1 (2022): 81. <https://doi.org/10.29240/jdk.v7i1.4805>.
- Saumantri, Theguh, and Abdu Zikrillah. "Teori Simulacra Jean Baudrillard Dalam Dunia Komunikasi Media Massa." *ORASI: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 11, no. 2 (2020): 247. <https://doi.org/10.24235/orasi.v11i2.7177>.
- Sekretariat Menkopolkham. "KKB Papua Sebagai Teroris," 2021. <http://www.youtube.com/c/KemenkoPolhukamRI>.
- Sunesti, Yuyun, Noorbaidi Hasan, and Muhammad Najib Azca. "Young Salafi-Niqabi and Hijrah: Agency and Identity Negotiation." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 8, no. 2 (2018): 173–98. <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i2.173-197>.
- Suradji, Adjie. *Terorisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Wardani, Ayu. "Peran Media Dalam Pemberitaan Terorisme." *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 17, no. 1 (2017): 29–36. <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/syiar/article/view/903>.